

Efektivitas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani di Kota Tangerang Selatan

Fadia Pramesti ^{1*}, Dini Gandini Purbaningrum ²

¹⁻²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Korespondensi penulis: fadiaaa17@gmail.com

Abstract. Sustainable Food Yard (P2L) is one of the priority programs in maintaining community food security. However, in the implementation of the program there are still problems, including the late delivery of assistance which has an impact on the delay in the implementation of activities so that the P2L program does not run in accordance with the technical instructions that have been issued each year, and assistance that is less than optimal. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the program to increase diversification and community food security through sustainable food yard activities (P2L) in farm women's groups in South Tangerang City. The method in this research is a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques used three ways, observation, interviews, and documentation studies. Then the collected data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results showed that the achievement of the program has not yet shown the expected effectiveness due to the delay in disbursement of funds which has an impact on the delay in the implementation of activities and has not yet achieved the program objectives in fulfilling food and nutrition sources, especially for stunting so that it has not been able to contribute to helping Posyandu in providing animal protein in the stunting locus determined by the Mayor of South Tangerang. The integration indicator is not yet fully effective because there are still farm women groups that have not received intensive assistance from the program assistants. In addition, the implementation of P2L procedures applied in South Tangerang City has not been maximized because the concept of seedling houses is not suitable for the hot conditions in South Tangerang City. The adaptation indicator has not run optimally because the use of facilities and infrastructure for P2L activities is still limited to conventional agricultural tools.

Keywords: Yard, Food, Sustainable, Diversified

Abstrak. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah salah satu program prioritas dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat masalah, antara lain keterlambatan penyerahan bantuan yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga program P2L tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan pada setiap tahunnya, dan pendampingan yang kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait efektivitas program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) pada kelompok wanita tani di Kota Tangerang Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian program belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan dikarenakan keterlambatan pencairan dana yang berdampak kepada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan belum tercapainya sasaran program dalam pemenuhan sumber pangan dan gizi, terutama untuk stunting sehingga belum dapat berkontribusi membantu Posyandu dalam penyediaan protein hewani di lokasi stunting yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Pada indikator integrasi yaitu belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kelompok wanita tani yang belum menerima pendampingan intensif dari pendamping program. Selain itu, pelaksanaan prosedur P2L yang diterapkan di Kota Tangerang Selatan juga belum dilaksanakan secara maksimal karena konsep rumah bibit yang tidak sesuai dengan kondisi panas di Kota Tangerang Selatan. Pada indikator adaptasi belum berjalan dengan optimal karena dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan P2L masih terbatas pada alat-alat pertanian konvensional.

Kata kunci: Pekarangan, Pangan, Lestari, Diversifikasi

1. LATAR BELAKANG

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan hak asasi setiap individu. Pemenuhan pangan yang mencerminkan ketahanan pangan dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, merata, dan terjangkau (Rumawas, Nayoan, & Kumayas, 2021), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Fauzi, Stiawati, & Arenawati, 2024). Ketahanan pangan menjadi fokus global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan berkaitan dengan tujuan tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tujuan ini menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN (Indriastuti, Priluddina, Rusmana, & Yuliyanto, 2023).

Provinsi Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia yang turut aktif menerapkan program SDGs dengan fokus pada meningkatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Provinsi Banten belum berhasil masuk dalam peringkat 10 besar indeks ketahanan pangan nasional, dan berada di peringkat ke-18. Untuk melihat seberapa besar IKP wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Banten	2020	2021	2022
Kota Tangerang	80,37	78,88	79,08
Kota Cilegon	70,23	71,42	72,63
Kota Serang	61,22	61,24	59,88
Kota Tangerang Selatan	83,14	83,74	78,74
Kabupaten Pandeglang	72,59	73,39	72,32
Kabupaten Lebak	70,78	72,60	71,96
Kabupaten Tangerang	72,47	76,07	77,00
Kabupaten Serang	77,07	77,70	78,63

Sumber: Badan Ketahanan Pangan 2020, 2021, dan 2022, Data Diolah oleh Peneliti

Dilihat pada tabel 1.1 Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten Tahun 2020-2022 bahwa hanya Kota Tangerang yang mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari tahun 2020-2022. Sedangkan kota/kabupaten lainnya di provinsi Banten justru ada mengalami stagnanisasi, fluktuatif, bahkan peningkatan skor IKP, contohnya Kota Tangerang Selatan yang mengalami fluktuatif skor IKP dari tahun 2020-2022. Fluktuasi skor IKP di Kota Tangerang Selatan ini mencerminkan adanya ketidakpastiaan dalam

ketersediaan pangan yang dapat mempengaruhi kestabilan pasokan pangan di berbagai tingkat.

Seiring dengan berkurangnya lahan pertanian akibat adanya penurunan area atau lahan pertanian aktif, maka dari itu pengembangan pertanian di Kota Tangerang Selatan kini berfokus pada konsep *urban farming* atau lebih dikenal sebagai pertanian perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program yang berfokus pada pemanfaatan pekarangan dan untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Upaya penganekaraman melalui pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Tangerang Selatan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan program berbasis pertanian yang dilaksanakan kelompok masyarakat melalui pemanfaatan lahan atau pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan serta sumber pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan program P2L dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam rangka penanganan daerah prioritas intervensi *stunting* dan penanganan daerah pemantapan ketahanan pangan (Renita, Helmyati, P, Sitorus, & Dilantika, 2023).

Adapun penerima manfaat program P2L di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2022, tercatat ada tujuh kelompok yang tersebar di tujuh kecamatan. Sementara, pada tahun 2023 terdapat dua kelompok yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Pamulang. Berkurangnya kelompok penerima bantuan P2L di Kota Tangerang Selatan dari 7 kelompok di tahun 2022 menjadi 2 kelompok di tahun 2023 disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan P2L karena sebagian besar kelurahan dengan lokus *stunting* di Tangerang Selatan adalah kelurahan yang lahannya sempit sehingga harus menggunakan lahan perusahaan bukan pribadi. Dalam penelitian ini, KWT Mangifera Nuri di Kelurahan Pondok Ranji dan KWT Mentari di Kelurahan Benda Baru ditetapkan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa dua kelurahan tersebut merupakan daerah yang telah mendapatkan inisiatif program P2L untuk mendukung penanganan daerah prioritas percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* tahun 2023.

Implementasi program P2L di Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang turut memengaruhi keberhasilan dari program P2L. Adapun faktor internal yang telah di

identifikasi dalam penelitian ini sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh pendamping program P2L Kelurahan Pondok Ranji, yaitu komitmen anggota KWT Mangifera Nuri terlihat menurun dari awal pembentukan, yaitu dari 30 anggota menjadi 16 anggota. Hal ini terjadi karena sebagai besar anggota KWT Mangifera Nuri adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak sekolah dan pekerjaan lain sehingga beberapa anggota mengundurkan diri akibat keterbatasan waktu dan tenaga untuk dapat konsisten dalam melaksanakan program ini.

Permasalahan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renita et al., (2023), yakni pelaksanaan program P2L di Kabupaten Sleman masih rentan terhadap keberlanjutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi program P2L terlihat hanya dilakukan pada tahap pendampingan program karena kelompok cenderung menghentikan program P2L atau pelaksanaannya tidak ideal seperti pada tahap awal program sehingga diperlukan penguatan kelembagaan agar pemerintah dapat memaksimalkan kembali program integratif untuk mencegah *stunting*. Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Fitrianie et al., (2023) bahwa adanya karakteristik dan kemampuan agen pelaksana program merupakan hal yang penting dalam mendukung efektivitas suatu program sehingga kendala pada kegiatan perlu diidentifikasi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai harapan.

Selain identifikasi faktor internal, adapun beberapa faktor eksternal yang masih mempengaruhi keberhasilan P2L di Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana observasi awal yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Kota Tangerang Selatan pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta Bidang Pertanian dan Peternakan bahwa ditemukan beberapa kendala, diantaranya adalah ketidakserentakan antara proses perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan penerbitan Petunjuk Teknis kegiatan P2L sehingga mempengaruhi kemunduran pelaksanaan kegiatan P2L. Dalam hal ini, pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian setiap tahun sehingga ketika terjadi perubahan sub-sub kegiatan yang disesuaikan oleh Juknis terbaru, maka Kota Tangerang Selatan juga harus mengikuti penyeragaman sub kegiatan baru tersebut.

Kondisi diatas akhirnya menyebabkan keterlambatan pencairan dana program baik tahap pertama maupun kedua. Pencairan dana P2L tahap pertama baru dilakukan pada triwulan ketiga, yaitu bulan Agustus 2023. Sedangkan untuk pelaksanaan termin kedua dilakukan pada triwulan keempat, yaitu November 2023. Keterlambatan pencairan dana ini

mengakibatkan semua aktivitas P2L mengalami kemunduran dari jadwal yang telah ditetapkan.

Selain permasalahan regulasi, faktor eksternal lain yang menjadi tantangan dalam implementasi P2L di Kota Tangerang Selatan adalah kondisi lingkungan. Informan dari keluarga dengan kasus *stunting* selaku penerima manfaat program P2L di Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Benda Baru mengungkapkan bahwa kontribusi P2L terhadap penanganan kasus *stunting* tidak dilaksanakan oleh KWT. Dalam hal ini, hasil dari P2L baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari belum dapat berkontribusi sebagai bahan pembuatan pemberian makanan tambahan yang dibagikan pada saat kegiatan posyandu karena hasil P2L di Kota Tangerang Selatan pada saat ini tidak mengarah pada kontribusi pemenuhan makanan sehat seperti protein hewani dan buah-buahan. Hasil produksi KWT baru berbasis pangan lokal seperti terong, kacang panjang, jagung, cabai, kangkung, dan pakcoy. Adapun hasil produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, yaitu kurang lebih 5-10 kilogram perjenis bibit yang ditanam dan hanya dapat mencukupi kebutuhan 1 (satu) RW. Sedangkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, lahan yang tersedia baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari tidak cukup memadai karena demplot kelompok yang tersedia hanya seluas 200m².

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, meskipun saat ini produksi P2L baru berkontribusi bagi keluarga anggota KWT dan masyarakat di sekitar KWT, namun keluarga dengan anak *stunting* yang seharusnya menjadi salah satu penerima manfaat program justru belum mendapatkan manfaat dari hasil produksi P2L. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan output program yang diterima oleh kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan P2L pada KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari perlu ditinjau lebih lanjut supaya tujuan utama dari program P2L, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pemenuhan pangan dan gizi keluarga khususnya kelompok rentan seperti keluarga dengan anak *stunting*.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas Program

Efektivitas program mengacu pada tingkat keberhasilan suatu program atau usaha sektor publik, sehingga suatu program atau usaha yang dilakukan oleh sektor publik dapat dikatakan efektif apabila berdampak signifikan dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan sasaran serta tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Steers (1985) pengukuran efektivitas dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: 1) Pencapaian tujuan, artinya keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, antara lain kurun waktu pencapaian, pencapaian sasaran, dasar hukum. 2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi. 3) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Program Pekarangan Pangan Lestari

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah suatu program yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan pendapatan (Rizky & Mashur, 2022). Pekarangan Pangan Lestari (P2L) diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian pada tahun 2020. Program P2L di Indonesia merupakan program lanjutan dari program sebelumnya, yaitu program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Indikator Keberhasilan Pekarangan Pangan Lestari

Keberhasilan kelompok wanita tani datang dari berbagai sumber diantaranya adalah dukungan, partisipasi, dan kerja sama yang dilakukan oleh anggota KWT tersebut. Hal ini disebabkan karena modal yang berperan penting dalam menumbuhkan partisipasi dan kerja sama kelompok adalah modal sosial (Rohaeni, 2022:30).

Adapun menurut (Rohaeni, 2022:31) indikator-indikator keberhasilan program P2L adalah sebagai berikut: a) Terjadinya pengurangan belanja bahan dapur atau penghematan pengeluaran rumah tangga; b) Terdapat perkembangan jumlah produksi yang dijual dari hasil produksi P2L; c) Terdapat jalinan kemitraan dengan pemerintah daerah lembaga dengan organisasi lainnya; dan d) Adanya kemandirian perempuan di dalam pengelolaan lahan pekarangan sehingga ketahanan pangan keluarga terjamin.

Kelompok Wanita Tani

Menurut Baroleh dalam (Nuryana *et al.*, 2022) kelompok wanita tani (KWT) adalah kumpulan ibu-ibu atau para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, dan kesamaan kepentingan memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas usaha tani

dan kesejahteraan anggotanya. Adanya KWT disinyalir sebagai salah satu sumbangsih dari perempuan dalam pembangunan khususnya di bidang pertanian.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan tersebut dianggap sesuai untuk menjelaskan secara mendalam terkait tanggapan dari berbagai kalangan, seperti kelompok sasaran dalam program P2L, yakni KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari, pelaku pelaksana program (tenaga penyuluh dan pendamping) serta pemegang kebijakan (DKP3 Kota Tangerang Selatan). Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan membentuk kelompok wanita tani (KWT). Indikator pencapaian tujuan ini dilihat dari kurun waktu pencapaian, sasaran program yang merupakan target kongkrit, dan dasar hukum kegiatan.

a. Kurun waktu pencapaian

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Pertanian dan Peternakan DKP3 menunjukkan bahwa pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2023 mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam standar operasional. Meskipun dari standar waktu yang ditetapkan dalam APBD, program ini direncanakan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, namun implementasinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Informan 1 (satu) menyebutkan bahwa pencairan dana untuk tahap I yang awalnya direncanakan dimulai pada awal triwulan kedua atau sekitar bulan April 2023, mengalami kemunduran jadwal hingga triwulan ketiga, dengan pencairan baru dilakukan sekitar bulan Agustus 2023. Sementara pelaksanaan termin kedua dilaksanakan pada triwulan keempat, yaitu November 2023 untuk pencairan Tahap II.

Keterlambatan pencairan dana menyebabkan kegiatan di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari tertunda, memaksa pelaksanaan kegiatan ke dalam waktu yang lebih padat. Informan menyebutkan bahwa situasi ini disebabkan oleh perubahan sub kegiatan di awal tahun pelaksanaan. Perubahan ini berdampak pada revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya disusun setahun sebelum pelaksanaan, sementara petunjuk teknis baru diterbitkan pada awal tahun pelaksanaan, mengharuskan Pemerintah Wali Kota Tangerang Selatan menyesuaikan sub kegiatan dengan juknis yang baru. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan pencairan dana sehingga mempengaruhi waktu dimulainya pelaksanaan program P2L.

Merujuk pada hasil penelitian, pelaksanaan P2L di Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan tahap I seharusnya disalurkan antara Februari hingga Juli, namun pencairan baru dilakukan pada Agustus 2023. Begitu juga dengan tahap II yang seharusnya disalurkan antara Juli hingga November, namun pencairan baru dilaksanakan pada November 2023.

Perubahan kebijakan yang terjadi di tengah jalan memerlukan waktu tambahan bagi pelaksana program untuk menyesuaikan prosedur dan koordinasi yang mengakibatkan ketidakpastian dan mempengaruhi waktu pelaksanaan. Hal ini dapat berdampak pada hasil produksi pangan dan ketahanan pangan lokal. Untuk mengatasi dampak perubahan kebijakan, diperlukan fleksibilitas dari pihak pelaksana serta komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak dapat terinformasi dengan baik mengenai perubahan dan dampaknya, serta dapat beradaptasi dengan cepat untuk meminimalkan gangguan dalam pelaksanaan program.

b. Sasaran Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program P2L di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari terbatas pada lingkup internal anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Meskipun berhasil meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, program belum menjangkau masyarakat lebih luas. Fokus produksi saat ini hanya pada tanaman lokal seperti kangkung, pakcoi, dan cabai, yang mana belum mencukupi kebutuhan gizi lengkap, termasuk protein hewani, untuk mendukung program penanganan *stunting*.

Informan dari keluarga dengan anak stunting mengkonfirmasi bahwa pemberian makanan tambahan (PMT) saat ini hanya dilakukan oleh PKK selaku Pokja 4 dan belum terintegrasi dengan KWT. Hal ini disebabkan oleh kegiatan P2L di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan pada keterbatasan lahan demplot kelompok, yaitu hanya sebesar 200m², sedangkan demplot tersebut dimanfaatkan oleh 30 anggota KWT di dalamnya sehingga apabila hasil produksi dibagikan kepada masyarakat luas selain anggota kelompok dan warga sekitar maka tidak akan mencukupi.

Keterbatasan lahan demplot seluas 200 m² menjadi salah satu kendala dalam memperluas manfaat program. Selain itu, orientasi kelompok yang masih bersifat sosial membuat hasil produksi hanya digunakan untuk kebutuhan internal kelompok dan biaya operasional, sehingga tidak memberikan pendapatan langsung bagi anggota. Untuk saat ini fokus program P2L di KWT Mangifera dan KWT Mentari adalah meningkatkan jumlah produksi terlebih dahulu sehingga apabila kebutuhan pangan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar kelompok sudah terpenuhi, maka selanjutnya hasil produksi bisa dibagikan kepada masyarakat luas.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pencapaian tujuan program secara keseluruhan, di mana tiga sasaran lainnya, yaitu penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dan masyarakat, komitmen dalam mendukung program penanganan *stunting*, dan meningkatkan pendapatan keluarga dari hasil pemanfaatan lahan belum berhasil. Ketidakberhasilan dalam mencapai tiga sasaran lainnya mengindikasikan bahwa strategi yang digunakan di dalam pelaksanaan program tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategi agar program P2L dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

c. **Dasar Hukum**

Penelitian ini mengidentifikasi dasar hukum sebagai indikator penting dalam pencapaian tujuan program P2L. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan belum memiliki dasar hukum lokal yang spesifik, sehingga bergantung pada kebijakan nasional. Pelaksanaan program P2L didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Penunjukan Lokus Stunting sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor

050/Kep.174-Huk/2022. Informan 1 (satu) selaku Staf Bidang Pertanian dan Peternakan DKP3 Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa perubahan sub kegiatan dalam program P2L sudah terjadi tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 sehingga pemerintah daerah harus terus menyesuaikan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa regulasi lokal yang spesifik, pelaksanaan program P2L di Kota Tangerang Selatan rentan terhadap perubahan kebijakan yang kurang mempertimbangkan kebutuhan lokal.

Meskipun Kota Tangerang Selatan tidak memiliki peraturan turunan yang spesifik mengatur pedoman kegiatan P2L, namun Kota Tangerang Selatan memiliki dasar hukum yang mengatur upaya penganekaragaman pangan melalui optimalisasi pekarangan di Kota Tangerang Selatan, yakni diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g. Perda tersebut mengamanatkan dengan adanya program optimalisasi lahan pekarangan, Kota Tangerang Selatan ingin mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan mendorong masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 juga menjadi dasar hukum pelaksanaan program P2L. Keputusan ini memastikan bahwa program P2L dilaksanakan di kelurahan yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2023. Dengan demikian, program ditempatkan pada lokasi yang relevan sesuai dengan kebijakan nasional terkait stunting. Dengan adanya regulasi tersebut, Kota Tangerang Selatan tetap memiliki pedoman umum untuk mendukung pelaksanaan program P2L, meskipun efektivitasnya terbatas tanpa peraturan turunan yang lebih spesifik.

Secara keseluruhan, temuan diatas menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi turunan di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi program P2L di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Integrasi

Proses integrasi dalam penelitian ini adalah komunikasi yang terjalin antara penyelenggara program dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tangerang Selatan dan Pendamping program P2L selaku unit kerja DKP3 Kota Tangerang Selatan dengan KWT yang melakukan edukasi dan pelatihan dalam

memanfaatkan lahan pekarangan. Adapun indikator integrasi diukur dengan pelaksanaan prosedur, proses sosialisasi, dan juga proses komunikasi.

a. Pelaksanaan prosedur

Pelaksanaan prosedur program P2L di Kota Tangerang Selatan telah diatur secara sistematis melalui Juklak dan Juknis dari Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Prosedur program dimulai dengan penerimaan surat dari Kementerian Pertanian, penyusunan proposal oleh DKP3, pengajuan RPD triwulanan, hingga monitoring dan evaluasi oleh Kementerian. Proses ini menunjukkan mekanisme kerja yang terstruktur sehingga setiap pihak dapat menjalankan tugas dengan jelas. Selain itu, pendamping ditunjuk untuk membantu kelompok wanita tani (KWT) dalam pengajuan administrasi, mulai dari penyusunan SK, pembukaan rekening kelompok, serta penyusunan AD/ART. Hal tersebut mencerminkan kejelasan pedoman dan legalitas administrasi.

Komponen kegiatan P2L mencakup pada pengadaan rumah bibit, demplot, kegiatan pertanaman pekarangan, dan kegiatan pasca panen. Namun, di dalam implementasinya ditemukan kendala dalam penerapan prosedur rumah bibit di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, yaitu suhu yang terlalu panas sehingga menyebabkan tanaman kerdil. Kendala tersebut menunjukkan bahwa standar operasional penggunaan rumah bibit yang berlaku kurang efektif diterapkan di KWT Mangifera dan KWT Mentari. Hal ini menyoroti pentingnya adaptabilitas prosedur sesuai dengan teori Steers (1985) yang menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Standar operasional pembangunan rumah bibit perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan iklim setempat, seperti penggunaan struktur rumah bibit yang lebih sesuai bagi wilayah dengan iklim panas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur program P2L di Kota Tangerang Selatan telah dirancang untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan setiap tahapan. Namun, implementasi dilapangan belum optimal akibat kurangnya adaptasi terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan revisi SOP yang didukung oleh contoh konkret dari Kementerian Pertanian mengenai konsep rumah bibit yang sesuai untuk kawasan dengan suhu tinggi guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dilapangan.

b. Proses Sosialisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa DKP3 Tangerang Selatan telah melakukan sosialisasi langsung kepada KWT melalui surat undangan yang ditujukan kepada KWT Mangifera Nuri maupun KWT Mentari terkait pertemuan koordinasi

(operasional P2L). Dalam proses sosialisasi, DKP3 Kota Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan tenaga penyuluh pertanian Jombang sebagai narasumber, dan pendamping program P2L. Pelaksanaan sosialisasi P2L di Kota Tangerang Selatan dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu tahap pertama difokuskan pada memberikan dasar pengetahuan kepada kelompok mengenai bercocok tanam, administrasi, persiapan lahan, dan prosedur awal pelaksanaan. Sedangkan tahap kedua berfokus pada monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan masukan demi perbaikan program.

Dari hasil kegiatan sosialisasi pertama, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa informan 6 (enam) dan 7 (tujuh) selaku ketua dan anggota KWT Mangifera Nuri telah memahami cara bercocok tanam, merawat tanaman, serta prosedur administrasi seperti RAB dan pascapanen. Sementara, untuk sosialisasi kedua dalam monev, bibit dan sarana prasarana telah terealisasi sesuai RAB, dan sebagian hasil panen dijual untuk mendukung biaya operasional kelompok. Para anggota juga telah mempelajari teknik pengemasan hasil panen untuk meningkatkan nilai jual. Selain itu, proses sosialisasi guna memperkuat kapasitas kelompok juga dilakukan melalui pembinaan berupa pelatihan tematik, seperti pengolahan pupuk kompos dan penggunaan teknologi tepat guna.

Secara keseluruhan penelitian, proses sosialisasi yang dilakukan pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Lampiran II Permentan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Operasional P2L, mencakup koordinasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan kegiatan. Proses sosialisasi ini mencerminkan adanya indikator kejelasan informasi, penerimaan peran, dan keterlibatan aktif anggota kelompok sesuai indikator sosialisasi menurut Steers (1985).

c. Komunikasi Peningkatan Pengetahuan KWT

Selain proses sosialisasi, dalam menilai efektif atau tidaknya suatu program, perlu juga dilakukan komunikasi antara pelaksana dan penerima program dengan maksud memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan, manfaat, dan prosedur program. Untuk menjalin komunikasi peningkatan kemampuan KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari, diketahui bahwa pihak DKP3 Kota Tangerang Selatan, tenaga penyuluh program, dan pendamping program telah melakukan sosialisasi, pelatihan tematik, serta bimbingan teknis. Sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun untuk memberikan pemahaman tentang pedoman teknis dan regulasi program P2L, sementara pelatihan tematik dan bimbingan teknis

berfungsi sebagai wadah untuk transfer pengetahuan dan penguatan kemampuan anggota KWT dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa pada KWT Mangifera Nuri, komunikasi yang terjalin antara anggota kelompok dengan pendamping sudah berjalan efektif. Pendamping secara konsisten memberikan edukasi mulai dari pemilihan bibit, teknik penanaman, hingga perawatan tanaman. Anggota KWT Mangifera Nuri aktif terlibat dalam pertemuan, pelatihan, dan bimbingan teknis, menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik. Hal tersebut menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi anggota untuk menerapkan pengetahuan baru.

Sementara itu, berbeda halnya dengan KWT Mentari, ditemukan informasi dari hasil monitoring dan evaluasi bahwa peran pendamping di KWT Mentari tidak berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu informan dari KWT Mentari yang mengatakan bahwa pendamping jarang melakukan kunjungan setelah awal program, sehingga anggota harus belajar secara mandiri untuk mengatasi masalah di lapangan. Keterbatasan komunikasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan, diperlukan pelatihan lanjutan bagi pendamping, mencakup teknik komunikasi dan manajemen kelompok, serta pengawasan berkala terhadap kinerja mereka.

Efektivitas dari program P2L sangat dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensi komunikasi serta pendampingan. Integrasi yang baik, seperti pada KWT Mangifera Nuri, meningkatkan keberhasilan program. Namun, kurangnya integrasi, seperti di KWT Mentari, menunjukkan bahwa program memerlukan pendekatan yang lebih koordinatif dan menyeluruh untuk mencapai tujuan, sesuai prinsip integrasi Steers (1985). Meskipun komunikasi telah terjalin, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pencapaian tujuan program secara merata.

Adaptasi

Adaptasi pada penelitian ini adalah kemampuan melakukan penyesuaian untuk menanggapi perubahan lingkungan ataupun kondisi eksternal yang ditunjukkan oleh DKP3 Kota Tangerang Selatan, penyuluh, dan pendamping program dengan KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

a. Peningkatan Kemampuan

Salah satu aspek peningkatan kemampuan yang perlu dipahami dan dikuasai oleh anggota kelompok tani adalah pengelolaan hama, hal ini karena pengelolaan hama yang

efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan memastikan hasil panen yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa untuk meningkatkan keterampilan KWT dalam mengatasi hama, DKP3 Kota Tangerang Selatan telah mengorganisir kehadiran Petugas Organisasi Pengganggu Tanaman (POPT) dari Provinsi Banten guna memberikan bantuan terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman. DKP3 Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemampuan adaptasi dengan menanggapi kebutuhan lokal KWT, menyadari bahwa permasalahan hama dan penyakit tanaman merupakan kendala signifikan yang perlu diatasi untuk keberhasilan program. Selain menghadirkan POPT, Bidang Pertanian DKP3 Kota Tangerang Selatan juga menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan pestisida organik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis anggota KWT, sekaligus memastikan bahwa praktik pertanian yang dilakukan sesuai dengan kebijakan lingkungan yang luas.

Proses adaptasi yang dilakukan telah melibatkan penyesuaian strategi, struktur, dan perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menghadapi masalah, KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari umumnya berkoordinasi dengan pendamping untuk menyelesaikan persoalan, termasuk masalah hama. Selain mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, anggota KWT juga melakukan pembelajaran mandiri melalui internet. Dalam menghadapi kendala lingkungan atau cuaca, kedua KWT mengatasi masalah dengan cara seperti penyemprotan pestisida, penggunaan bahan organik, serta pemagaran untuk melindungi tanaman. Pemilihan dan penerapan strategi ini disesuaikan dengan kondisi spesifik yang dihadapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua KWT mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Pembelajaran mandiri ini juga mencerminkan kemampuan adaptasi individu dan kelompok dalam menghadapi masalah yang tidak terduga.

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Selain peningkatan kemampuan, adaptasi dalam pelaksanaan program P2L juga dapat dilihat dari aspek kelengkapan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan, teknologi yang diterapkan masih terbatas pada hidroponik, sementara inovasi seperti aquaponik dan tabulampot belum diadopsi karena memerlukan investasi lebih besar. Meskipun demikian, teknologi hidroponik lebih diterima dan diterapkan oleh anggota KWT yang tidak memiliki pengalaman teknis mendalam.

Selain itu, temuan penelitian berdasarkan studi dokumentasi mengenai sarana dan prasarana diketahui bahwa dalam rencana kebutuhan anggaran (RKA) yang diajukan untuk kegiatan P2L baik di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari masih berbasis

konvensional, seperti cangkul, selang air, sekop, dan sarung tangan karet, hal ini karena pengadaan modernisasi alat-alat pertanian bukan kebutuhan prioritas dalam kegiatan P2L, melainkan alokasi anggaran lebih difokuskan pada pengembangan demplot dan rumah bibit yang berfungsi langsung dalam mendukung tujuan utama program.

Sementara itu, temuan lainnya dalam penelitian justru menunjukkan pemanfaatan rumah bibit baik di KWT Mangifera dan KWT Mentari masih belum optimal karena jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh suhu dalam rumah bibit yang terlalu panas sehingga mengharuskan penanaman dialihkan ke lahan terbuka. Hal ini mencerminkan ketidakefisienan dalam alokasi anggaran, di mana investasi besar tidak diikuti dengan pemanfaatan maksimal. Secara keseluruhan, meskipun adaptasi sudah dilakukan dalam beberapa aspek, namun efektivitas program P2L masih terbatas karena perencanaan dan implementasi teknologi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Tangerang Selatan, khususnya di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari, masih belum tercapai secara optimal. Pertama, pencapaian tujuan program P2L belum menunjukkan hasil yang diharapkan, meskipun dasar hukum pelaksanaan P2L sudah sesuai dengan Permentan Nomor 8 Tahun 2023 dan Berita Acara Penentuan Kelurahan sebagai Lokus Penurunan Stunting 2023. Kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan pelaksanaan program, belum optimalnya kontribusi program dalam memperbaiki gizi *stunting*, dan belum berhasil mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kedua, integrasi dalam program P2L belum berjalan efektif, meskipun proses sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan, namun komunikasi antara pendamping dan anggota KWT masih terbatas. Selain itu, aspek pelaksanaan prosedur belum maksimal karena ketidaksesuaian standar operasional pembangunan rumah bibit dengan kondisi wilayah yang panas, sehingga rumah bibit di KWT Mangifera Nuri dan KWT Mentari tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, indikator adaptasi terhadap pemanfaatan sumber daya dan faktor lingkungan belum berjalan efektif. Meskipun kelompok telah mampu mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman dengan bantuan POPT (Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), adaptasi dalam pemanfaatan rumah bibit dan penggunaan alat pertanian modern menghadapi

tantangan, hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar operasional dan kondisi lokal.

Saran

Pertama, Kementerian Pertanian perlu meninjau dan melakukan evaluasi kembali mengenai standar operasional prosedur pembangunan rumah bibit supaya tidak hanya cocok diterapkan untuk wilayah dataran tinggi tetapi juga sesuai untuk wilayah perkotaan yang umumnya beriklim panas.

Kedua, DKP3 Kota Tangerang Selatan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pendamping program dengan tujuan memastikan pendamping memberikan bimbingan dan dukungan yang berkualitas dan efektif kepada anggota KWT sehingga program P2L dapat memberikan hasil yang maksimal bagi penerima program maupun masyarakat.

Ketiga, Perlu adanya kreativitas dari pengurus P2L untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keragaman komoditas produksi. Hal tersebut mencakup tidak hanya pada komoditas sayuran saja, tetapi juga melakukan inovasi integrasi tanaman, ternak, dan buah-buahan pada lahan kelompok serta pekarangan masing-masing.

Keempat, Perlu adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang lebih intensif serta penguatan kelembagaan dan sinergitas antar sektor agar pelaksanaan program P2L dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya penanganan masalah gizi di Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrohman, A., Arkasala, F. F., & Nurhidayah, N. (2021). Penerapan konsep urban farming-based resilient city dalam pengembangan kota yang berketahanan pangan di Kota Surakarta. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 3(2), 162–170.
- Adha, S. (2024). Kecamatan Pamulang masuk tiga kecamatan terendah kasus stunting di Tangsel. Diakses pada 21 Februari 2024, dari <https://www.radarbanten.co.id/2024/02/07/kecamatan-pamulang-masuk-tiga-kecamatan-terendah-kasus-stunting-di-tangsel/>
- Annas, A. (2017). *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*. Jakarta: Celebes Media Perkasa.
- Ashari, G. I., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2022). Efektivitas program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(2), 336–351.

Berita Acara Penentuan Kelurahan sebagai Lokus Penurunan Stunting Tahun 2023.

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2(1), 49–57.
- Fauzi, N., Stiawati, T., & Arenawati. (2024). Inovasi pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan ketahanan pangan (Studi kasus pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 52–70.
- Fitrianie, S., Irawati, I., & Utami, S. B. (2023). Inovasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L): Studi pada Kelompok Wanita Tani Kencana Arum dan Kelompok Tani Sadang Serang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 504–512.
- Habibi, M. (2022). Sinergitas implementasi kebijakan program Pekarangan Pangan Lestari mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 5(1), 197–206.
- Hasibuan, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, I. (2023, Januari 30). Hasil survei, angka stunting di Tangsel tinggal 9 persen. Diakses pada 21 Februari 2024, dari posrakyat.id: <https://posrakyat.id/2023/01/30/hasil-survei-angka-stunting-di-tangsel-tinggal-9-persen/2/>.
- Indriastuti, D., Priluddina, M., Rusmana, R. B., & Yuliyanto, T. (2023). Tata kelola kolaboratif program ketahanan pangan di Kodim 0733 Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4613–4629.
- Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2023.
- Musdalifah, Baruwadi, M. H., & Moonti, A. (2022). Dampak program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani padi sawah di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *AGRINESA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 7(1), 35–45.
- Nuryana, Arsyad, A., & Novita, I. (2022). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam program Pekarangan Pangan Lestari di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal AgribiSains*, 8(2), 82–88.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Petunjuk Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2022.*

- Pujiana, T., Rangga, K. K., Syarief, Y. A., & Mutolib, A. (2020). Strategi pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP)*, 5(3), 79–86.
- Purnaningsih, N., & Lestari, E. (2021). Keberlanjutan program Kawasan Rumah Pangan Lestari bagi satu kelompok wanita tani di Kelurahan Beji, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 39(1), 69–80.
- Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan P2L KWT Mangifera Nuri.*
- Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan P2L KWT Mentari.*
- Renita, R., Helmyati, S., P, D. N., Sitorus, N. L., & Dilantika, C. (2023). Kontribusi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sleman selama masa pandemi Covid-19. *Amerta Nutrition*, 7(3SP), 30–40.
- Rizky, N., & Mashur, D. (2022). Pengelolaan program Pekarangan Pangan Lestari melalui Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 317–324.
- Rohaeni, D. (2022). Program Kawasan Rumah Pangan Lestari: Peran Kelompok Wanita Tani “Srikandi Mrican” dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Padukuhan Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.
- Santosa, I. (2018). *Pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Kerjasama LP2M dan Penerbit Erlangga.
- Sutrisno, A. D. (2022). Kebijakan sistem ketahanan pangan daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Undangan Kelompok Wanita Tani dalam Kegiatan Pertemuan Koordinasi (Operasional P2L).*
- Undangan Peserta Kelompok Wanita Tani dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Status Kelompok Tani.*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.